

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan bidang ekonomi dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, yaitu mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Pencapaian sasaran yang dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan direalisasikan melalui penyusunan perencanaan pembangunan. Salah satu perhatian dalam penyusunan perencanaan tersebut dapat dilakukan dengan menggali, mengelola, dan mengembangkan sumber-sumber ekonomi yang selanjutnya hasilnya ditujukan untuk kepentingan pembangunan nasional. Ini berarti diperlukan suatu model perencanaan yang dapat mengidentifikasi atas keunggulan maupun kelemahan dari sektor-sektor ekonomi yang ada di suatu daerah (Tarigan, 2004).

Pemerintah daerah dan masyarakat melakukan pembangunan daerah untuk mengelola semua sumber daya yang dimiliki guna mendorong perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) serta dapat menciptakan lapangan kerja baru bagi wilayah yang bersangkutan. Adanya permasalahan dalam pembangunan daerah terletak pada penetapan prioritas kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya fisik.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999/Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 / Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah pusat untuk memberdayakan dan meningkatkan kemampuan masyarakat di daerah dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah. Kedua undang-undang tersebut, memiliki makna yang sangat penting bagi daerah karena adanya pemberian urusan, sumber daya manusia dan pembiayaan, yang selama ini merupakan tanggung jawab pemerintah pusat.

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi sebagai indikatornya. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, yang antara lain diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi daerah adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah.

Menurut Perroux dengan teori pertumbuhan menyatakan bahwa pertumbuhan di berbagai daerah tidak muncul dalam waktu yang bersamaan. Pertumbuhan tersebut hanya terjadi di beberapa tempat yang merupakan pusat (kutub) pertumbuhan dengan tingkat intensitas yang berbeda (Perroux, dalam Mudrajat 2002). Salah satu pendorong pertumbuhan adalah adanya kekayaan alam yang selanjutnya dapat dijadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan dapat memberikan dampak penyebar (spread effect). Namun tidak semua provinsi

memiliki Sumber Daya Alam (SDA) secara merata. Hal tersebut yang menjadi salah satu penyebab timbulnya kesenjangan atau ketimpangan daerah.

Hasil pengelolaan alam dan pendapatan pajak yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada akhirnya akan didistribusikan ke seluruh daerah. Walaupun pendapatan tersebut sudah dibagikan secara merata, tetapi masih terdapat daerah-daerah yang terbelakang baik dari segi ekonomi maupun pembangunan. Masalah tersebut berasal pada pola pendistribusian yang dilakukan pemerintah pusat yang membagi rata pendapatan yang diterima ke seluruh daerah tanpa melihat kondisi daerah tersebut apakah sudah maju atau masih terbelakang. Sehingga daerah maju akan semakin maju dan daerah kurang maju menjadi semakin tertinggal pembangunannya.

Menurut Sultan dan Sodik (2010), ada beberapa faktor yang menyebabkan adanya ketidakmerataan tingkat pertumbuhan ekonomi antar daerah antara lain konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, alokasi investasi yang tidak merata, tingkat mobilisasi barang dan jasa rendah, perbedaan kondisi geografis, dan kerjasama antar daerah belum optimal terutama daerah perbatasan. Tetapi, proses pembangunan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Akan terdapat daerah yang mengalami pembangunan secara cepat sementara daerah lain memiliki laju pertumbuhan yang lambat.

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di pulau Jawa yang juga tidak terlepas dari masalah ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya pembangunan ekonomi di Indonesia dan untuk dapat memanfaatkan sumber daya ekonomi

daerah secara optimal, maka pembangunan dapat disusun menurut tujuan antar sektor. Perencanaan sektoral tersebut bertujuan untuk mengembangkan sektor-sektor yang disesuaikan dengan keadaan dan potensi masing-masing daerah serta tujuan pembangunan yang ingin dicapai. bahwa tingkat laju pertumbuhan ekonomi provinsi-provinsi di pulau Jawa nilai rata-rata pertumbuhan yang paling tinggi yaitu Provinsi Banten sedangkan yang paling rendah yaitu Provinsi Jawa Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah masih rendah dan ada ketimpangan yang cukup besar antar kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Setiap provinsi hendaknya mampu mengoptimalkan semua potensi yang dimiliki oleh daerahnya, dalam hal ini adalah masing-masing kabupaten/kota dan juga peran pemerintah harus mampu mendukung pembangunan di tiap-tiap kabupaten/kota sehingga tujuan pemerataan pembangunan oleh pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik. Letak Provinsi Jawa Tengah cukup strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat yang merupakan salah satu pusat perdagangan dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar dan wisata. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, letak Jawa Tengah berada di tengah jalur perdagangan dan industri yang seharusnya memberikan dampak yang baik pada pembangunan di Jawa Tengah.

Laju pertumbuhan di Jawa Tengah tidak terlepas dari peran serta perekonomian 29 kabupaten dan 6 kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Masing-masing kabupaten/kota tersebut memiliki potensi sumber daya yang

sangat besar dan dapat memberi kontribusi bagi pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. Ketimpangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah juga ditunjukkan dari nilai PDRB perkapita tiap kabupaten/kota. PDRB perkapita yang tinggi menunjukkan semakin baik tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sebaliknya bahwa PDRB perkapita yang rendah menunjukkan semakin buruk tingkat kesejahteraan masyarakatnya. PDRB perkapita kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1
PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
tahun 2014 Dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan 2010 (rupiah)

No	Kabupaten/kota	PDRB Perkapita
1	Kab Cilacap	49701639,13
2	Kab Banyumas	17951796,22
3	Kab Purbalingga	15243008,74
4	Kab Banjarnegara	12928143,62
5	Kab Kebumen	12850435,66
6	Kab Purworejo	14610781,16
7	Kab Wonosobo	14086668,62
8	Kab Magelang	14522073,52
9	Kab Boyolali	17837382,40
10	Kab Klaten	18536374,63
11	Kab Sukoharjo	23833154,36
12	Kab Wonogiri	17032584,31
13	Kab Karanganyar	23824166,49
14	Kab Sragen	23036709,13
15	Kab Grobogan	11201049,41
16	Kab Blora	14412597,93
17	Kab Rembang	16743855,58
18	Kab Pati	19033268,20
19	Kab Kudus	76239588,13
20	Kab Jepara	13945165,23
21	Kab Demak	12722892,08
22	Kab Semarang	27881809,93
23	Kab Temanggung	16223559,67
24	Kab Kendal	25103759,40
25	Kab Batang	15875053,96
26	Kab Pekalongan	14405114,37
27	Kab Pemalang	10818553,89
28	Kab Tegal	13347882,95
29	Kab Brebes	14149098,02
30	Kota Magelang	41432683,74
31	Kota Surakarta	52845072,88
32	Kota Salatiga	40413152,61
33	Kota Semarang	61268049,53
34	Kota Pekalongan	19595518,82
35	Kota Tegal	34584266,65
Jawa Tengah		22756769,60

Sumber data : BPS (Badan Pusat Statistik tahun 2014).

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pada tahun 2014 hanya ada beberapa kabupaten/kota yang memiliki tingkat PDRB perkapita yang tinggi. Berdasarkan hal tersebut, terjadi ketimpangan pendapatan antar kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut merupakan indikator adanya ketidakmerataan atau disparitas antar kabupaten/kota yang harus dicari penyesuaian.

Kabupaten/kota yang memiliki sektor andalan diharapkan mampu mengangkat sektor-sektor lain agar lebih maju lagi sehingga pergeseran sektoral di Provinsi Jawa Tengah dapat berjalan bersamaan meskipun dengan tingkat perkembangan yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat pembangunan akan membawa dampak terhadap perbedaan tingkat kesejahteraan antar kabupaten/kota yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan antar kabupaten/kota semakin besar. Untuk itu perlu adanya kebijakan yang berupa pemanfaatan sektor-sektor basis dari masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah guna mengurangi ketimpangan yang terjadi.

Adanya ketimpangan ekonomi antar-wilayah yang terjadi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah sangat menarik untuk dikaji. Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Jawa Tengah”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis merumuskan permasalahan penelitian yang menjadi dasar kajian, sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi (PDRB Perkapita) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?
2. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 menurut Tipology Klassen?
3. Berapa besar tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015?

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut ini:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi (PDRB Perkapita) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.
2. Untuk menganalisis pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015 menurut Tipology Klassen.
3. Untuk mengetahui besarnya tingkat ketimpangan distribusi pendapatan antar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2011-2015.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun secara teoretis. Manfaat tersebut adalah sebagai berikut ini:

1. Bagi pemerintah, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran bagi Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mengatasi ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah.
2. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya tentang pertumbuhan dan ketimpangan antar wilayah.
3. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan wacana bagi arahan pengembangan wilayah dengan memperhatikan korelasi antara potensi ekonomi dan pemanfaatan ruang wilayah.
4. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk mengaplikasikan teori yang diperoleh selama mengikuti pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan analisis data menggunakan Model Tipologi Klassen dan Analisis Indeks Williamson. Melalui analisis ini diperoleh empat klasifikasi melalui pendekatan wilayah. Kabupaten/kota yang masing-masing mempunyai karakteristik pertumbuhan

ekonomi dan pendapatan perkapita yang berbeda-beda diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan wilayah (Syafriyazal, 2012).

Melalui pendekatan sektoral, analisis Tipologi Klassen merupakan perpaduan antara alat analisis LQ dengan Model Rasio Pertumbuhan. Sektor ekonomi di tiap kabupaten/kota yang memiliki karakteristik pertumbuhan dan pangsa yang berbeda-beda dapat diklasifikasikan dengan tipologi Klassen pendekatan sektoral.

Sedangkan analisis ketimpangan antar wilayah digunakan analisis Indeks Williamson. Indeks Williamson mempunyai nilai antara 0-1, dimana semakin mendekati nol artinya maka menunjukkan wilayah tersebut semakin tidak timpang, dan apabila mendekati satu maka wilayah tersebut semakin timpang.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan sistematika Bab yang terdiri dari Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV Hasil dan Pembahasan, serta Bab V Penutup.

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Menguraikan Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis Penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data serta Metode Analisis Data.

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS

Menguraikan Deskripsi Objek Penelitian, Analisis Data dan Interpretasi Hasil.

BAB V: PENUTUP

Menguraikan Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran-saran.